



---

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah berkat rahmatNya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama yang mewajibkan unit organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV Tahun 2018, kami menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Penyusunan LKj Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi juga



---

dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, penyajian LKj Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV Tahun 2018 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama Triwulan IV agar dapat melaksanakan kinerja pada Triwulan berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di masa mendatang agar lebih produktif, efisien dan efektif.

Bukittinggi, Januari 2019

Kepala,

**H. Abrar Munanda, MAg**  
NIP. 197105141995031001



---

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang ORTAKER Kedudukan dan tugas, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi :

1. Memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan Umrah;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan.



Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tersebut diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan akhlak mulia dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Bukittinggi sebagai Kota yang religius, aman, damai dan sejahtera.

Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam melaksanakan fungsi utama di atas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan 6 Program sejalan dengan diterapkannya restrukturisasi penganggaran yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik.

Capaian Kinerja yang diperoleh Triwulan IV Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan sasaran program secara rata-rata keseluruhan dalam



Tahun 2018 adalah **97 % (Sembilan puluh tujuh persen)** dengan rincian sebagai berikut :

**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,  
pada Sub Bagian Tata Usaha**

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN, Capaian Kinerja 99,53 %
2. Sasaran Strategis, Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Capaian Kinerja 99,91 %
3. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN, Capaian Kinerja 95,41 %
4. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana, Capaian Kinerja 99,61 %
5. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Perencanaan, Capaian Kinerja 99,98 %
6. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Administrai Umum, Capaian Kinerja 99,10 %
7. Sasaran Strategis, Terlaksananya Layanan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan, Capaian Kinerja 99,96 %
8. Sasaran Strategis, Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Capaian Kinerja 100 %

**Program Bimbingan Masyarakat Islam, seksi Bimas Islam**

1. Sasaran Strategis, Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Capaian Kinerja 101 %
2. Sasaran Strategis, Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, Capaian Kinerja 0 %
3. Sasaran Strategis, Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam, Capaian Kinerja 99,96 %



4. Sasaran Strategis, Pengelolaan urusan Agama Islam dan pembinaan syariah, Capaian Kinerja 100 %
5. Sasaran Strategis, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam, Capaian Kinerja 92,66 %

#### **Program Pendidikan Islam**

1. Sasaran Strategis, Peningkatan Mutu dan Relevansi pada PAIS, Capaian Kinerja 99,20 %
2. Sasaran Strategis, Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam, Capaian Kinerja 99,55 %
3. Sasaran Strategis, Meningkatnya Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah, Capaian Kinerja 98 %
4. Sasaran Strategis, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Capaian Kinerja 97 %
5. Sasaran Strategis, Tersedianya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, Capaian Kinerja 97,04 %

#### **Program Bimbingan Masyarakat Katolik**

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik, capaian kinerja 100 %
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, capaian kinerja 99,47 %

#### **Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen, capaian kinerja 71,53 %

#### **Program Penyelenggara Haji dan Umrah**

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri, Capaian Kinerja 97,47 %



2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji, Capaian Kinerja 100 %
3. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Sasaran Strategis 82,11 %
4. Sasaran Strategis, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Capaian Kinerja 111,56 %

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 di triwulan IV ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendapat tambahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. **23.592.767.000,-** (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan realisasinya Rp. **22.821.345.246,-** (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), (**97 %** dari alokasi anggaran).

Secara umum dari sasaran, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan diharapkan pada Triwulan berikutnya semua kegiatan yang terdapat pada sasaran akan terlaksana dengan baik dan efektif dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Bukittinggi, Januari 2019  
Kepala,

**H. Abrar Munanda, MAg**  
NIP. 197105141995031001



---

## DAFTAR ISI

|                                                         | Halaman |
|---------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                    | i       |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                | iii     |
| DAFTAR ISI .....                                        | viii    |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                            | 1       |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1       |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....                    | 2       |
| C. Aspek Strategis .....                                | 4       |
| D. Struktur Organisasi .....                            | 7       |
| E. Sistematika Penyajian .....                          | 11      |
| BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....    | 14      |
| A. Rencana Strategis .....                              | 17      |
| B. Perjanjian Kinerja .....                             | 43      |
| BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....                 | 46      |
| A. Penetapan Indikator kinerja .....                    | 47      |
| B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja .....                | 50      |
| 1. Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja 2018 .....        | 51      |
| 2. Sasaran Program pada Seksi Bimas Islam .....         | 52      |
| 3. Sasaran Program pada Pendidikan Islam .....          | 54      |
| 4. Sasaran Program pada Seksi Haji Haji dan Umrah ..... | 56      |
| 5. Sasaran Program pada Subag Tata Usaha .....          | 57      |
| 6. Sasaran Program pada Bimas Kristen .....             | 59      |
| 7. Sasaran Program pada Bimas Katolik .....             | 60      |
| C. Analisis Capaian Kinerja .....                       | 61      |
| D. Akuntabilitas Keuangan .....                         | 66      |
| BAB IV :    PENUTUP .....                               | 71      |

### LAMPIRAN:

Matrix Laporan Capaian Kinerja Periode Triwulan IV  
Perjanjian Kinerja  
Rencana Kinerja Tahunan





---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.

Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode tahun 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan untuk tahun 2015 Visi Indonesia adalah mengacu kepada *Millenium Development Goals* (MDG's), Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat yang setinggi-tingginya di seluruh Republik Indonesia.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal



dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra Kementerian Agama, dan Renstra Kementerian Agama Kota Bukittinggi serta seluruh sator/satker Kementerian Agama menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga di capai tujuan yang obyektif, terukur, dan tepat sasaran.

Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan di evaluasi melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) setiap Triwulan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 702 tahun 2016 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pada Kementerian Agama merupakan pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) tiap Triwulannya dan Perjanjian Kinerja yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tupoksi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*).

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ortaker Kanwil dan Kemenag, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:



## **1. Kedudukan**

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Tugas Pokok**

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Visi, Misi serta kebijakan teknis dibidang Pelayanan dan Bimbingan kehidupan beragama di Kota Bukittinggi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang Bimbingan Masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama bimbingan masyarakat, Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;



4. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama di Kota Bukittinggi;

### **C. Aspek strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal



maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan lampiran Perpres Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.



Prioritas yang menjadi tanggung jawab dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah prioritas bidang pendidikan dan prioritas yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan. Selain itu Kementerian Agama juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Berkaitan dengan pencapaian target prioritas dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang difokuskan pada 6 bidang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan beragama, agar terwujud suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional tanpa membedakan untuk memandang bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan tetapi sebagai sesuatu kekayaan bangsa;
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, agar terwujud kehidupan yang harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umat beragama, yang mampu melayani seluruh umat beragama yang tidak hanya untuk umat atau golongan tertentu saja;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, agar tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat;

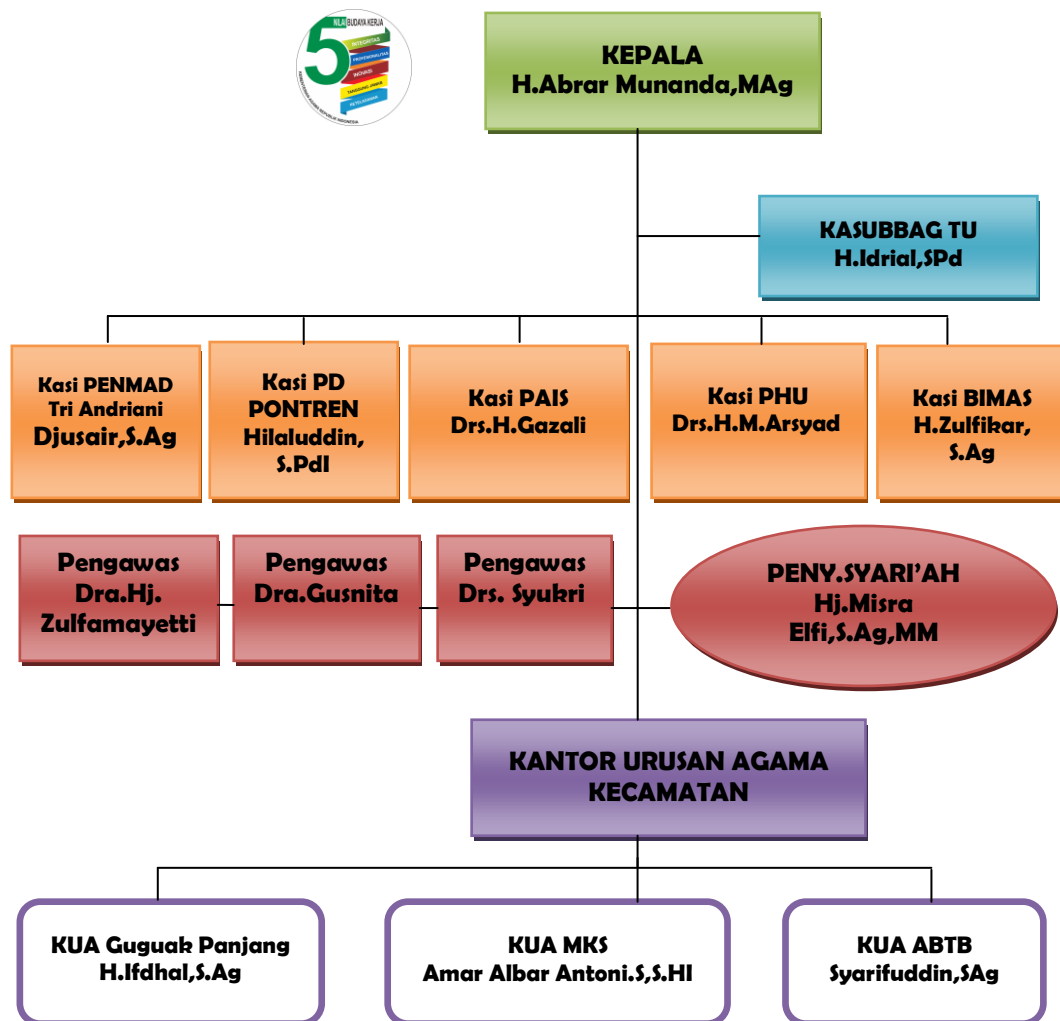


5. Meningkatkan Pendidikan agama dan keagamaan, raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, agar terwujud pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa dan mampu meningkatkan tata kelola pendidikan agama dan keagamaan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, agar terwujud penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional, dan harus mampu menjamin akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut :

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala Kantor                     | : H. Abrar Munanda, MAg      |
| 2. Kasubag Tata Usaha                | : H. Idrial, S.Pd            |
| 3. Kasi Pendidikan Madrasah          | : Tri Andriani Djusair, S.Ag |
| 4. Kasi Pend. Diniyah dan Pontren    | : Hilaluddin, Spdl           |
| 5. Kasi Pendidikan Agama Islam       | : Drs. H. Gazali             |
| 6. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah | : Drs. H. M. Arsyad          |
| 7. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam   | : H. Zulfikar, S.Ag          |
| 8. Penyelenggara Syariah             | : Hj. Misra Elfi, S.Ag       |



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan tata kerja

Berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja di atas, komposisi jabatan struktural pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon III, 7 (tujuh) pejabat eselon IV/a, 3 (tiga) pejabat eselon IV/b dan 4 (empat) pejabat eselon V. Jumlah Pegawai/personil Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi hingga semester II ini secara keseluruhan didukung oleh 105 orang ASN, terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 55 orang ( 52,4 %) dan ASN Perempuan sebanyak 50 ( 47,61 %) dengan dikurangi pegawai pensiun





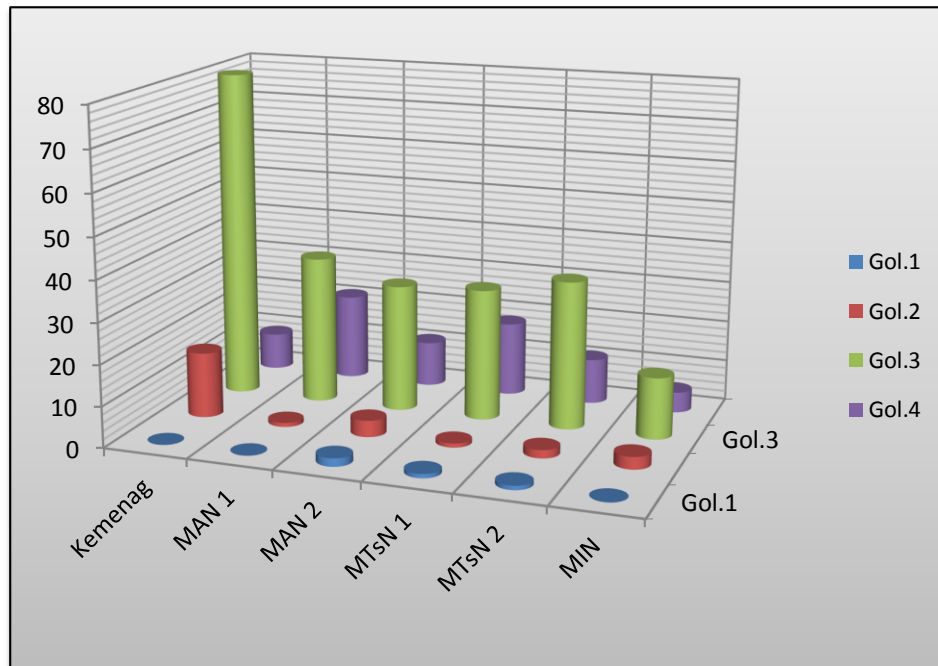
sebanyak 4 orang. Adapun komposisi personil ASN menurut jenis kelamin, golongan dan pendidikan disajikan pada gambar 1.2 s/d 1.4 dan table 1.1 s/d 1.2, sebagai berikut :



Gambar 1.2 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi berdasarkan Gender

Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN Kemenag Kota Bukittinggi Berdasarkan Golongan

| NO            | SATUAN KERJA      | JUMLAH     | GOLONGAN |           |            |           |
|---------------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
|               |                   |            | I        | II        | III        | IV        |
| 1             | Kankemenag        | 105        | 0        | 16        | 80         | 9         |
| 2             | MAN 1             | 58         | 0        | 1         | 36         | 21        |
| 3             | MAN 2             | 48         | 2        | 4         | 31         | 11        |
| 4             | MTsN 1            | 52         | 1        | 1         | 32         | 18        |
| 5             | MTsN 2            | 50         | 1        | 2         | 36         | 11        |
| 6             | MIN Gulai Banchah | 23         | 0        | 3         | 15         | 5         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>336</b> | <b>4</b> | <b>27</b> | <b>230</b> | <b>75</b> |



Gambar 1.3 Komposisi ASN Kemenag Berdasarkan Golongan

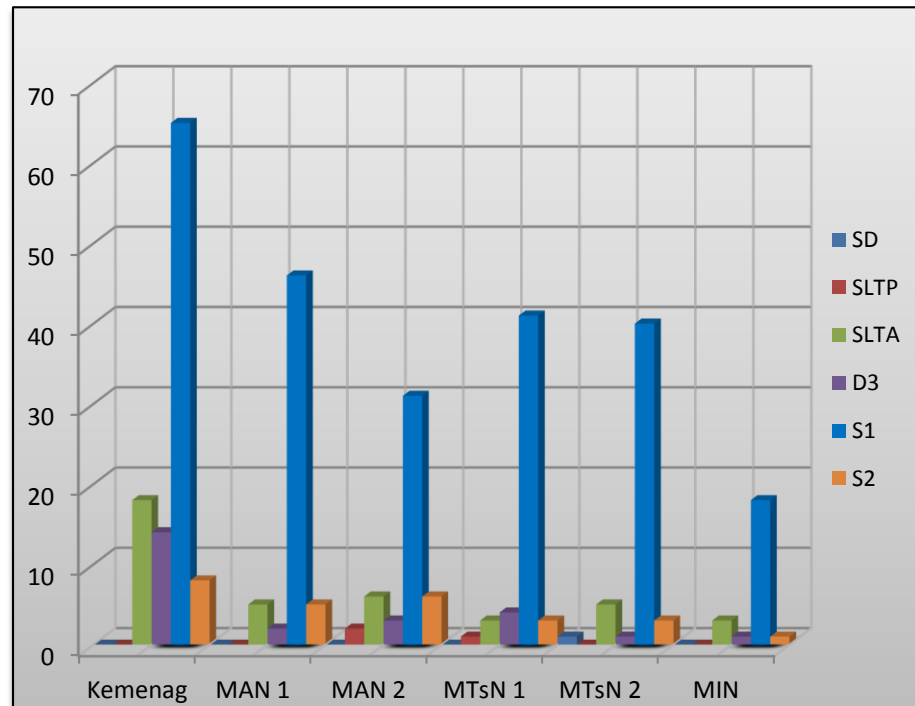
Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 65 orang ( 61,90%), selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 18 orang (16,7%), S2 sebanyak 8 orang (7,62%), kemudian D3 sebanyak 14 orang (13,33 %), SLTP sebanyak 0 orang (0%) dan setingkat SD sebanyak 0 orang (0%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| NO | SATUAN KERJA | JUMLAH | PENDIDIKAN |      |     |      |     |     |     |
|----|--------------|--------|------------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|    |              |        | SD         | SLTP | SMU | DIPL | S-1 | S-2 | S-3 |
| 1  | Kankemenag   | 105    | 0          | 0    | 18  | 14   | 65  | 8   | 0   |
| 2  | MAN 1        | 58     | 0          | 0    | 5   | 2    | 46  | 5   | 0   |
| 3  | MAN 2        | 48     | 0          | 2    | 6   | 3    | 31  | 6   | 0   |



|               |                   |            |          |          |           |           |            |           |          |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 4             | MTsN 1            | 52         | 0        | 1        | 3         | 4         | 41         | 3         | 0        |
| 5             | MTsN 2            | 50         | 1        | 0        | 5         | 1         | 40         | 3         | 0        |
| 6             | MIN Gulai Banchah | 23         | 0        | 0        | 3         | 1         | 18         | 1         | 0        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>336</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>40</b> | <b>25</b> | <b>241</b> | <b>26</b> | <b>0</b> |



Gambar 1.4 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi berdasarkan jenjang pendidikan

## E. Sistem Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap Triwulannya dalam tahun berjalan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan setiap triwulan tahun berjalan, sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada bulan berikutnya.



Dalam menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi ini menyampaikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan perjanjian/ penetapan kinerja yang ditargetkan pada tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rician sebagai berikut:

**BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan struktur organisasi



dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018**, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja harus sesuai dengan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Kemudian realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.





---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa berdasarkan PMA 13 Tahun 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan bidang keagamaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Bukittinggi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program dan;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kota Bukittinggi.



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Kementerian Agama 2015-2019
2. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 2015-2019
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
4. Rencana Kerja Tahun 2018

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yaitu bidang (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : *“Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* dengan melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan dilakukan melalui empat fokus agenda prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh:

- (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang Agama
- (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik;
- (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama;
- (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan





(e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Dalam rangka mencapai tujuan bidang Agama dan Pendidikan yang menjadi tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, maka telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan.

Arah kebijakan Kementerian Agama juga terkait erat dengan sasaran strategis nasional bidang pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Selaras dengan sasaran strategis nasional bidang agama dan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan kepada 5 hal pokok :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2018, maka Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 sebagai berikut:



## **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Agama yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan Presiden kepada Kementerian Agama.

Penyusunan Renstra Kementerian Agama mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pendidikan dan bidang Kesejahteraan Rakyat. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antar unit-unit di bawah Kementerian Agama. Secara ringkas substansi Renstra Kementerian Agama dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Didalamnya memuat 8 aspek yang menjadi fokus pembangunan bidang agama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Perencanaan strategis menentukan kemana arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran. Secara umum rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Adapun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memuat:

1. Visi

*“Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Visi ini sejalan dengan visi Kemenag *“Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 mengemban 7 (tujuh) misi yang dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;



- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

### 3. Tujuan

Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah **“Terwujudnya masyarakat Kota Bukittinggi yang beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

### 4. Sasaran

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan serta berdasarkan atas tujuan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menetapkan dan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama periode tahun 2015-2019, bidang



yang diprioritaskan, yaitu : kehidupan beragama dalam meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien dan transparan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

**a. Bidang Kehidupan Beragama**

Dalam pembangunan bidang Agama, masyarakat Kota Bukittinggi selalu bepegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa, yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penegasan terhadap peran Agama dalam rangka mengisi pembangunan.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah memberikan dorongan dan bantuan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selain memberikan dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada tahun 2011 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (*Gemmar Mengaji*) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan.

Sebuah pemahaman yang baik perlu dibuktikan di dalam kehidupan nyata dalam bentuk pengamalan ajaran agama. Agama akan memberikan peran yang positif terhadap pembangunan ketika pemahaman dan pengamalan para pemeluk ajaran agama terus menerus mengalami perbaikan kualitasnya.

Dalam pembangunan bidang Agama, masyarakat Kota Bukittinggi selalu berpegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa,



yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penegasan terhadap peran Agama dalam rangka mengisi pembangunan.

Ada 6 (enam) kerangka dasar yang melandasi implementasi pembangunan bidang Agama di Kota Bukittinggi, yaitu :

**1. Pembangunan nilai-nilai agama dan budaya luhur sebagai spirit**

Pembangunan bidang agama diintegrasikan melalui nilai budaya, adat dan etika dalam proses pembangunan ke depan dalam falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

**2. Berbasis Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan bidang agama diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat yang beragama guna memenuhi kebutuhan spritual dan moral etikanya, oleh karena itu dilaksanakan atas dasar partisipasi masyarakat Agamis.

**3. Berorientasi pada kemandirian yang tinggi**

Pembangunan bidang agama berpijak pada prinsip kemandirian yang tinggi di tingkat lembaga keagamaan karena bertumpu kepada partisipasi masyarakat Agamis.

**4. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, keadilan dan kesetaraan**

Pembangunan di bidang agama menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, keadilan dan kesetaraan dengan mengedepankan tata nilai keluhuran agama yang tinggi kepada seluruh masyarakat di Kota Bukittinggi

**5. Berwawasan kebangsawanan**

Pelaksanaan pembangunan agama di Kota Bukittinggi memiliki nilai wawasan kebangsaan yang selaras dengan muatan nilai-nilai keluhuran agama sehingga tercipta kehidupan beragama yang ideal.



## **6. Menjunjung Tinggi 5 Nilai Budaya Kerja**

Prilaku Aparat Sipil Negara yang menjadi pelaksana pembangunan bidang agama di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi haruslah menjunjung tinggi **5 Nilai Budaya Kerja (Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan)**.

Sasaran strategis dalam bidang kehidupan beragama dapat dilihat dengan terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif.
- 2) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional.
- 3) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Agama.
- 4) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
- 5) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa.
- 6) Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmonisasi antar peradaban.
- 7) Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
- 8) Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.



- 9) Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
- 10) Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama.
- 11) Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- 12) Meningkatnya sumber informasi keagamaan
- 13) Meningkatnya kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan
- 14) Berkembangnya pusat-pusat kajian keagamaan
- 15) Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera, dan;
- 16) Meningkatnya partisipasi lembaga sosial keagamaan sebagai agen pembangunan Nasional.

**b. Bidang Kerukunan Umat Beragama**

Pemerintah Kota khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan masyarakat dan pelajar.

Sasaran strategis bidang kerukunan umat beragama dapat dilihat dengan terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.





- 2) Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional.
- 3) Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama.
- 4) Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota.
- 5) Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender, dan HAM.
- 6) Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.

**c. Bidang Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Sasaran strategis bidang raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya);
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustha yang bermutu;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan pesantren salafiyah ulya bermutu;
- 4) Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional;
- 5) Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;



- 6) Tersedianya Ma'had Aly pada pondok pesantren;
- 7) Tersedianya layanan pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada pondok pesantren;
- 8) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah;
- 9) Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah;
- 10) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 11) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 12) Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- 13) Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus;
- 14) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Ada beberapa permasalahan yang ditenggarai menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta, dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan;
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- 3) Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional;



- 4) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan;
- 6) Masih terdapat kesenjangan antar lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum;
- 7) Mayoritas lembaga pendidikan di bawah binaan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas;
- 8) Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam menyusun kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- 9) Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP pendidikan agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

**d. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Terwujudnya jemaah haji mandiri;
- 2) Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif;
- 3) Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji;
- 4) Terwujudnya sistem informasi yang handal;



- 5) Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji;
- 6) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai;
- 7) Meningkatnya pengelolaan dana haji.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

- 1) Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan;
- 2) Pelayanan penyelenggaraan haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jama'ah yang beragam dari segi latar belakang, usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
- 3) Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, transportasi, bimbingan, kesehatan, keamanan, dan perlindungan jama'ah;
- 4) Profil jama'ah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
- 5) Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji.

**e. Bidang Tata Kelola Kepemerintahan**

Sasaran strategis bidang tata kelola pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional, yang ditandai dengan:

- 1) Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh;



- 2) Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan siklus minimal 5 (lima) tahunan;
- 3) Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 4) Terwujudnya struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan;
- 5) Menurunnya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal;
- 6) Meningkatnya recovery, revaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset;
- 7) Terbangunnya rintisan *e-government* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- 8) Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional;
- 9) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
- 10) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai basis kebijakan;
- 11) Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Ada sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, antara lain:

- 1) Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;



- 2) Kapasitas dan profesionalisme sebagai aparatur masih rendah;
- 3) Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;
- 4) Masih terbatasnya kapasitas manajerial pengelolaan Barang Milik Negara.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Triwulan IV tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- A. Dalam membuat program Bimbingan Masyarakat Islam, ada beberapa sasaran strategis yang direncanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diantaranya :
  1. Untuk meningkatkan Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, ada beberapa rencana yang akan diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diantaranya :
    - a) pembinaan bagi penghulu untuk membentuk penghulu yang profesional dan berintegritas dengan memberikan honor bagi tim penilai angka kredit bagi penghulu dalam kurun waktu 1 tahun;
    - b) peningkatan kualitas manajemen kelembagaan KUA yang memenuhi standar pelayanan minimal ( rapat koordinasi, pembinaan operator sistem informasi KUA, jasa profesi dan transport penghulu serta supervisi dan pengelolaan PNBPN dengan volume 9 lokasi dalam waktu 1 tahun;
    - c) melakukan pembangunan gedung balai nikah dengan volume 1 lokasi;



- d) melakukan bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah dengan volume 300 orang dalam waktu 1 tahun anggaran.
2. Untuk peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, maka akan dilakukan pembuatan legalitas tanah wakaf dengan volume 4 lokasi selama tahun anggaran 2018.
3. Dalam mewujudkan pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam telah direncanakan beberapa kegiatan berupa:
  - b. Tunjangan bagi penyuluh Agama Islam Non-PNS sebanyak 24 orang;
  - c. Pembinaan dan peningkatan kompetensi Penyuluh Agama Islam berupa transport pembinaan bagi penyuluh agama islam sebanyak 24 orang;
  - d. Mengikuti Musabaqah al-Qur'an dan al-Hadits tingkat kabupaten/kota dengan volume kegiatan 1 kali, berupa transpor pendamping kafilah Kota pada MTQ tingkat Nasional selama Tahun Anggaran 2018.
4. Untuk mewujudkan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana untuk melakukan kegiatan berupa perjalanan dinas luar dan dalam kota, dalam rangka pengelolaan Hisab Rukyat berupa verifikasi arah kiblat dan rukyatul hilal sebanyak 20 kali dalam tahun anggaran 2018.
5. Salah satu implementasi dari pencapaian *good governance* adalah dengan adanya perbaikan kinerja dari aparatur



pemerintahan itu sendiri. Sebagai kompensasinya diberikan tunjangan kinerja dimana besarnya ditentukan dengan *grade* atau level, tergantung kepada beban kerja dari pegawai itu sendiri. Untuk tercapainya sasaran strategis yaitu dalam rangka pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Bimas Islam, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan untuk terlaksananya pelayanan perkantoran dengan pemberian tunjangan dan gaji bagi Aparatur Sipil Negara dalam tahun anggaran 2018.

B. Pada Triwulan IV Tahun 2018 ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam hal ini Bagian Pendidikan Islam (Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam dan Seksi PD Pontren) mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan beberapa Sasaran Strategis yang telah diberikan diantaranya :

1. Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan tunjangan profesi kepada Guru PAI Non PNS sebanyak 25 orang dan pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI selama 1 tahun.
2. Untuk meningkatkan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana melaksanakan kegiatan berupa :
  - a. Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam dengan pemenuhan target 1 dokumen selama tahun 2018 berupa safeguarding BOS, PIP, dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam;





- b. Pemberian tunjangan fungsional bagi Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam dalam mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan sebanyak 3 orang ;
    - c. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi MDTA, Pendidikan Al-Qur'an dan Pendidikan Pesantren di Kota Bukittinggi sebanyak 5 lembaga selama tahun 2018.
  3. Dalam meningkatkan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan berupa :
    - a. Layanan Manajemen Madrasah dan RA dengan target 2 dokumen selama 1 tahun;
    - b. Pelaksanaan UAMBN PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah selama 1 tahun dengan target 1 dokumen;
    - c. Selain itu juga direncanakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk siswa MI pada semester IV ini ada tambahan siswa dengan jumlah 696 orang siswa, bagi siswa madrasah MTs juga ada penambahan sebanyak 374 orang dan untuk MA direncanakan penambahan kepada siswa sebanyak 172 orang siswa;
    - d. Pemberian Bantuan BOP bagi siswa RA sebanyak 191 orang dalam kurun waktu 1 tahun;
  4. Dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan madrasah, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan tunjangan profesi bagi



Guru Non-PNS sebanyak 30 orang dan pemberian tunjangan fungsional / insentif bagi guru Non-PNS sebanyak 93 orang, tambahan perencanaan pemberian tunjangan Guru MIN dari tahun 2016 hingga november 2018 serta pemberian gaji dan tunjangan profesi guru dan pengawas PNS yang lulus sertifikasi RA/Madrasah selama tahun anggaran 2018;

5. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Madrasah. Dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya layanan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pada pendidikan Islam dengan volume 12 layanan, serta Layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun anggaran 2018.

C. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis yaitu terlaksananya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN, akan diadakan layanan internal (*overhead*) berupa pengadaan peralatan dan mesin dengan volume 1 unit dalam Tahun Anggaran 2018;
2. Dalam proses pembinaan Administrasi Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera dan kredibel yang berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui Pembinaan dan pengembangan SDM dan Layanan



Kesejahteraan Sosial dengan volume 1 kegiatan dalam tahun Anggaran 2018;

3. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembinaan administrasi keuangan dan BMN. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara selama Tahun Anggaran 2018 dan menyediakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan untuk pelayanan PTSP dengan target 1 Layanan;
4. Untuk terlaksananya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melakukan koordinasi penyelesaian hasil pengawasan dan pengendalian internal berupa kegiatan rapat-rapat selama tahun anggaran 2018;
5. Dalam mewujudkan Pembinaan Administrasi Perencanaan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana melakukan kegiatan penyusunan rencana program dengan volume 1 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dalam tahun anggaran 2018;
6. Untuk mewujudkan system kepegawaian yang *unifed* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan dalam meningkatkan kualitas administrasi umum, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai 3 indikator kinerja yaitu :
  - a) Penyediaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan peralatan dan mesin dengan volume 1 unit;



- b) Indikator yang kedua yaitu rehabilitasi gedung dan bangunan dengan volume 1 unit;
  - c) Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa pemeliharaan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, langganan daya dan jasa dan operasional perkantoran dan pimpinan selama Tahun Anggaran 2018;
7. Untuk meningkatkan kualitas administrasi informasi keagamaan dan kehumasan, melalui peningkatan kualitas mutu SDM yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi dan penunjang sarana dan prasarana, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana untuk melaksanakan Pembinaan Administrasi Informasi dan kehumasan berupa layanan data dan informasi yakni pengelolaan TIK dan media informasi elektronik berupa pengadaan media informasi dengan volume 1 Layanan;
8. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tentang peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memiliki 2 indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2018 yaitu :
- a. Operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota berupa bantuan biaya operasional FKUB dengan volume 1 lokasi selama 1 tahun dalam tahun Anggaran 2018;
  - b. Pengembangan Kerukunan Umat Beragama berupa monitoring, evaluasi dan koordinasi kehidupan kerukunan umat beragama berupa dialog lintas agama dengan



berbagai kalangan masyarakat dan profesi di tingkat Kecamatan dengan volume 1 dialog selama tahun anggaran 2018;

D. Dalam rangka mewujudkan program penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan beberapa sasaran strategis dalam tahun anggaran 2018 diantaranya:

1. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jama'ah Haji dalam meningkatkan kualitas dokumen pelayanan pendaftaran calon jama'ah haji, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana untuk memberikan pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji berupa:
  - a. Peningkatan dalam hal pengurusan dokumen dan perlengkapan haji dengan volume 12 bulan selama tahun berjalan;
  - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji berupa rapat koordinasi dengan instansi terkait selama tahun anggaran 2018.
2. Dalam meningkatkan Pelayanan Pembinaan Haji, dengan sasaran meningkatkan petugas haji yang professional yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima, di tandai dengan persiapan rekrutmen petugas dan pelaksanaan seleksi petugas pendamping jama'ah haji dengan volume 1 kegiatan untuk 12 orang dalam Tahun Anggaran 2018 dan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa pengadaan peralatan dan mesin dengan volume 12 bulan;



3. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan system informasi yang memadai dan tata kelola yang baik dan bersih, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan untuk pengelolaan layanan jaringan internet dan Intranet SISKOHAT tepat waktu dengan volume 1 kegiatan dalam tahun anggaran 2018.
  4. Untuk meningkatkan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah, guna menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan bagi jama'ah haji, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengelolanya selama 1 Tahun Anggaran.
- E. Dalam rangka mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan layanan perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Tahun Anggaran 2018;
- F. Dalam rangka mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Bimbingan Masyarakat Katolik, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan beberapa sasaran strategis dalam tahun anggaran 2018 yaitu Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi bagi Aparatur Sipil



Negara (Guru) dan Layanan Perkantoran berupa Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dalam bentuk honor Aplikasi Keuangan selama Tahun Anggaran 2018.

Proses perencanaan anggaran dalam system anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Anggaran berbasis kinerja ini mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat.

Pengendalian efektifitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai dengan memperhatikan penetapan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat yang jelas, serta kejelasan indikator kinerja. Oleh karena itu, untuk memotivasi pelaksana berperilaku efisien dan efektif, diperlukan penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja, dan penetapan harga satuan yang rasional.

Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah dokumen resmi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan bidang Agama untuk periode lima tahun ke depan (2015-2019). Pembangunan bidang agama sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis ini, mencakup mengenai kondisi yang diharapkan, formulasi kebijakan, program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Untuk lebih jelasnya lagi akan terlihat pada table berikut ini :

| Sasaran                                                         | Indikator Kinerja Utama |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tujuan: “Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Taat Beragama, |                         |



| Sasaran                                                                                              | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</b> |                                                                                                                                                                           |
| <b>Misi 1 : Sasaran Bidang Agama</b>                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br><br>Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah                     | 1. Jumlah Penghulu yang terbina<br>2. Jumlah KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal<br>3. Jumlah Pembangunan Balai Nikah<br>4. Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah |
| <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf    | 1. Jumlah Legalitas Tanah Wakaf                                                                                                                                           |
| <b>Sasaran Strategis 3</b><br>Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam          | 1. Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS<br>2. Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas<br>3. Jumlah Penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits        |
| <b>Sasaran Strategis 4</b><br>Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah      | 1. Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat                                                                                                                                        |
| <b>Sasaran Strategis 5</b><br>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam    | 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                                                                                                          |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.</b>           |                                                                                                                                                                           |





| Sasaran                                                                                                        | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Peningkatan Mutu, dan Relevansi PAIS                                             | 1. Jumlah Guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan Profesi<br>2. Jumlah Guru PNS PAI yang menerima tunjangan Profesi                                                                                                                                                       |
| <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam  | 1. Jumlah Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam<br>2. Jumlah Guru/Ustadz pendidikan Keagamaan Islam penerima tunjangan fungsional<br>3. Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan al-Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) |
| <b>Sasaran Strategis 3</b><br>Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah                                   | 1. Jumlah Dokumen Layanan Manajemen Madrasah dan RA<br>2. Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan<br>3. Jumlah Siswa MI penerima BOS<br>4. Jumlah Siswa MTs penerima BOS<br>5. Jumlah Siswa MA penerima BOS<br>6. Jumlah Siswa RA Penerima BOP                          |
| <b>Sasaran Strategis 4</b><br>Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | 1. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional/Insentif<br>2. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi<br>3. Jumlah Gaji dan tunjangan Guru PNS dan Pengawas<br>4. Jumlah Guru PNS Penerima Tunjangan Kinerja                                                  |



| Sasaran                                                                                                                           | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis 5</b><br>Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Layanan Internal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</li> <li>2. Jumlah Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan</li> </ol> |
| <b>Misi 3: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah</b>                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Meningkatnya pelayanan Haji Dalam Negeri                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji</li> <li>2. Jumlah Layanan Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji</li> </ol>           |
| <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Petugas Haji yang Profesional</li> <li>2. Jumlah Layanan Internal</li> </ol>                                                        |
| <b>Sasaran Strategis 3</b><br>Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu                                     | Pengelolaan Layanan Jaringan Internet dan Intranet SISKOHAT                                                                                                                          |
| <b>Sasaran Strategis 4</b><br>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Jumlah Layanan Perkantoran                                                                                                                                                           |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa</b>                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN                                                   | Jumlah Layanan Internal (overhead)                                                                                                                                                   |



| Sasaran                                                                                                       | Indikator Kinerja Utama                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian                                | Jumlah Layanan Manajemen SDM                                                                                          |
| <b>Sasaran Strategis 3</b><br>Meningkatnya kualitas pengelola Administrasi Keuangan dan BMN                   | 1. Jumlah Layanan Internal (overhead)<br>2. Jumlah Layanan Perkantoran                                                |
| <b>Sasaran Strategis 4</b><br>Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tata Laksana                  | Jumlah Layanan Manajemen Organisasi                                                                                   |
| <b>Sasaran Strategis 5</b><br>Terlaksananya Pembinaan Kualitas Administrasi Perencanaan                       | 1. Jumlah Layanan Perencanaan                                                                                         |
| <b>Sasaran Strategis 6</b><br>Terlaksananya Pembinaan Kualitas Administrasi Umum                              | 1. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran<br>2. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan<br>3. Jumlah Layanan Perkantoran |
| <b>Sasaran Strategis 7</b><br>Terlaksananya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan          | Jumlah Layanan Data dan Informasi                                                                                     |
| <b>Sasaran Strategis 8</b><br>Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama                           | 1. Jumlah Lokasi Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota<br>2. Jumlah Dialog Lintas Agama di Kecamatan                 |
| <b>Misi 5 : Sasaran Bidang Bimas Kristen</b>                                                                  |                                                                                                                       |
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen | Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                  |



| Sasaran                                                                                                           | Indikator Kinerja Utama                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Misi 6 : Sasaran Bidang Bimas Katolik</b>                                                                      |                                                         |
| <b>Sasaran Strategis 1</b><br>Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik | Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran |
| <b>Sasaran Strategis 2</b><br>Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik      | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan                    |

## B. Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan



instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Jadi pada dasarnya Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Menjadi dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Kankemenag yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja tingkat Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah ditandatangani pada bulan januari tahun 2018.











### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, dalam rangka mewujudkan visi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik.

Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain.

Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat menyelesaikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Berikut ini diuraikan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan masing-masing Sasaran Program yang telah ditetapkan.



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Lebih dari 100%       | Sangat Baik |
| 2  | 75 – 100%             | Baik        |
| 3  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4  | Kurang dari 55 %      | Kurang      |

#### A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi meliputi *Input* dan *Output*.

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Penetapan kinerja disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.



---

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

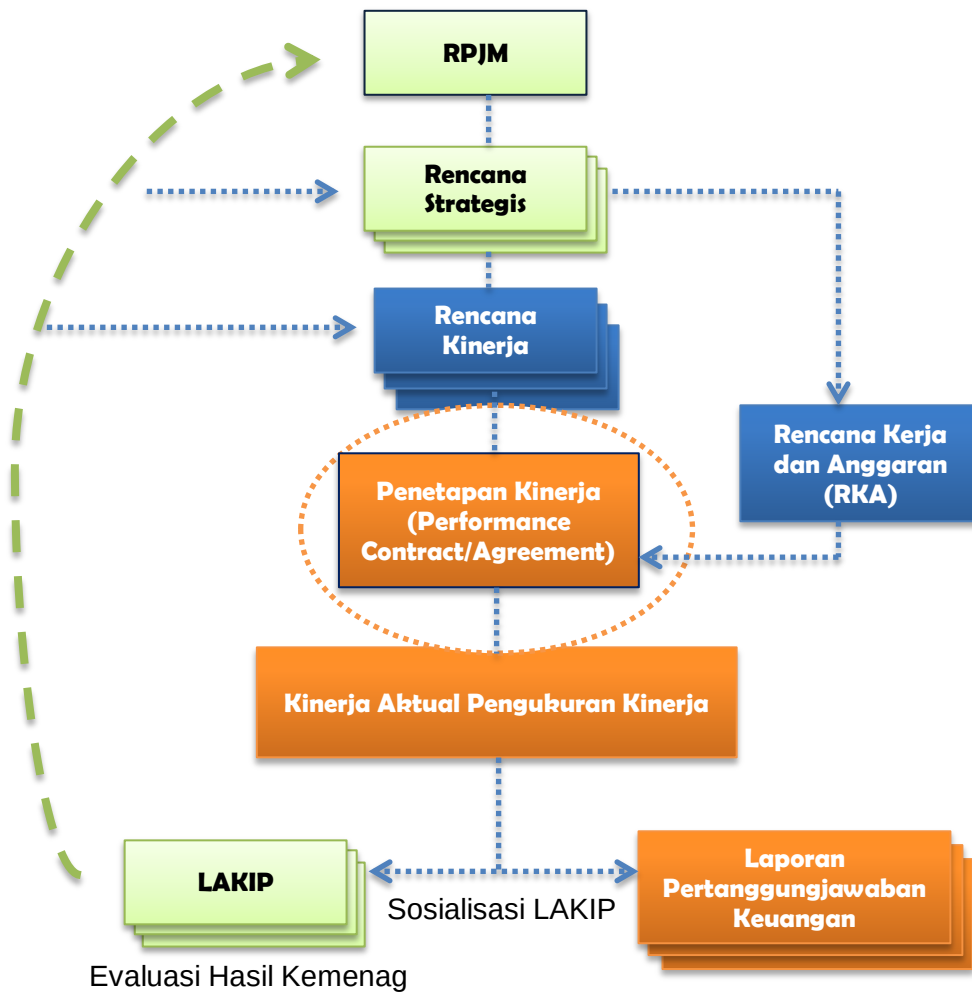
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp.). Indikator *Input* lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data.

Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi bergantung dari *Output* yang dihasilkan. Indikator *Benefit* dan *Impact* diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategik. Dalam menetapkan indikator sasaran strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

Posisi Penetapan Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Gambar 3.1 Posisi Penetapan Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan, maka diajukan dan di setujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan



dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Laporan kinerja yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Pentingnya Laporan kinerja ini bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini antara lain:

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja;
4. Sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

## **B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.



Hal ini diperoleh dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

### **C. Pengukuran Kinerja**

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi berperan untuk menganalisis dan membantu memperbaiki masalah-masalah dalam pencapaian kinerja. Hasil kerja yang dicapai haruslah memberikan kontribusi yang penting bagi organisasi yang dilihat dari segi kualitas yang dirasakan oleh organisasi dan sangat besar manfaatnya pada masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai;
- Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
- Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap system yang ada.

Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi.

Penggunaan data dan informasi guna melakukan evaluasi lebih diprioritaskan pada kecepatan untuk memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan akan segera dilakukan.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi yang sudah tercapai.

Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

#### 1. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Program Bimbingan Masyarakat Islam**

| Sasaran Strategis |                                                | Indikator Kerja                                      | Target   | Realisasi | %      |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1                 | Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah | 1 Jumlah Penghulu yang Terbina                       | 11 Orang | 11 Orang  | 99,96  |
|                   |                                                | 2 Jumlah KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal | 3 Lokasi | 3 Lokasi  | 107,62 |
|                   |                                                | 3 Jumlah Pembangunan Balai Nikah                     | 1 Lokasi | 1 Lokasi  | 100    |





| Sasaran Strategis |                                                                      | Indikator Kerja                                             | Target    | Realisasi | %     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                   |                                                                      | 4 Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah                     | 300 orang | 300 orang | 99,67 |
| 2                 | Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  | 1 Jumlah Legalitas Tanah Wakaf                              | 4 Lokasi  | -         | -     |
| 3                 | Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam        | 1 Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS             | 24 Orang  | 24 Orang  | 100   |
|                   |                                                                      | 2 Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas              | 24 Orang  | 24 Orang  | 98,80 |
|                   |                                                                      | 3 Jumlah Penyelenggara an Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits | 1 Kali    | 1 Kali    | 100   |
| 4                 | Meningkatnya Pengelola an Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah   | 1 Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat                           | 20 Kali   | 20 Kali   | 100   |
| 5                 | Dukungan Manajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan                             | 12 bulan  | 12 bulan  | 92,66 |



## 2. Seksi Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Pendidikan Islam seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat di lihat gambaran pencapaiannya sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program Pendidikan Islam**

| Sasaran Strategis |                                                                                 | Indikator Kerja                                                                                                               | Target    | Realisasi                    | %   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----|
| 1.                | Peningkatan Mutu dan Relevansi PAIS                                             | 1 Jumlah Guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi                                                                     | 18 Guru   | 18 Guru dari tahun 2017-2018 | 100 |
|                   |                                                                                 | 2 Jumlah Guru PNS PAI yang menerima tunjangan Profesi                                                                         | 12 bulan  | 12 bulan                     | 99  |
| 2.                | Peningkatan Akses, mutu dan relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam | 1 Jumlah Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam                                                                         | 1 Dokumen | 1 Dokumen                    | 75  |
|                   |                                                                                 | 2 Jumlah Guru/Ustadz pendidikan Keagamaan Islam penerima tunjangan fungsional                                                 | 3 orang   | 3 orang                      | 100 |
|                   |                                                                                 | 3 Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah /Pendidikan al-Qur'an/Pendidikan Pesantren penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) | 5 Lembaga | 5 Lembaga                    | 100 |



| Sasaran Strategis |                                                                                  | Indikator Kerja                                                  | Target     | Realisasi          | %     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 3.                | Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah                                   | 1 Jumlah Dokumen Layanan Manajemen Madrasah dan RA               | 2 Dokumen  | 2 Dokumen          | 100   |
|                   |                                                                                  | 2 Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan                     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen          | 100   |
|                   |                                                                                  | 3 Siswa MI penerima BOS                                          | 696 Orang  | 696 Orang          | 100   |
|                   |                                                                                  | 4 Siswa MTs penerima BOS                                         | 374 Orang  | 374 Orang          | 100   |
|                   |                                                                                  | 5 Siswa MA penerima BOS                                          | 172 Orang  | 172 Orang          | 100   |
|                   |                                                                                  | 6 Jumlah Siswa RA Penerima BOP                                   | 191 Orang  | Siswa RA 187 Orang | 97,91 |
| 4                 | Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | 1 Jumlah Penerima Tunjangan Fungsional/Insentif Guru Non-PNS     | 93 Guru    | 76 Guru            | 81,72 |
|                   |                                                                                  | 2 Jumlah Tunjangan Profesi Guru Non-PNS                          | 30 Guru    | 30 Guru            | 100   |
|                   |                                                                                  | 3 Jumlah Gaji dan Tunjangan Guru dan PNS Pengawas                | 12 bulan   | 12 bulan           | 100   |
|                   |                                                                                  | 4 Jumlah Tukin Guru MIN                                          | 19 Guru    | 19 Guru            | 99    |
| 5                 | Dukungan Manajemen Pendidikan                                                    | 1 Jumlah Layanan Internal Perangkat Pengolah Data dan komunikasi | 12 Layanan | 12 Layanan         | 100   |



| Sasaran Strategis                  | Indikator Kerja                                                   | Target   | Realisasi | %  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----|
| dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya | 2 Jumlah Layanan Perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 12 Bulan | 12 Bulan  | 97 |

### 3. Seksi Haji dan Umrah

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Program Penyelenggara Haji dan Umrah**

| Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja                                     | Target     | Realisasi  | %     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Meningkatnya pelayanan Haji Dalam Negeri | Jumlah Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 97,04 |
|                                          | Jumlah Layanan Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100   |
| Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji    | Jumlah Petugas Haji yang Profesional                  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100   |
|                                          | Jumlah Layanan Internal                               | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100   |
| Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem | Pengelolaan Layanan Jaringan Internet dan             | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 82,11 |



| Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja          | Target   | Realisasi | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| Informasi Haji Terpadu                                                                       | Intranet Siskohat          |          |           |        |
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Jumlah Layanan Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 111,56 |

#### 4. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**  
**(Sub.Bagian Tata Usaha)**

| Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                  | Target    | Realisasi               | %     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN | Jumlah Layanan Internal (overhead) | 1 Layanan | 1 Layanan               | 99,53 |
| Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian  | Jumlah Layanan Manajemen SDM       | 1 Layanan | 1 Layanan               | 99,91 |
| Meningkatnya                                      | Jumlah Layanan Internal            | 1 Layanan | Perencanaan rumah dinas | 99,64 |



| Sasaran Strategis                                                      | Indikator Kinerja                             | Target     | Realisasi                                                | %     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Kualitas Administrasi Keuangan BMN                                     | (overhead)                                    |            |                                                          |       |
|                                                                        | Jumlah Layanan Perkantoran                    | 12 Bulan   | 12 Bulan                                                 | 95,37 |
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tata Laksana         | Jumlah Layanan Manajemen Organisasi           | 1 Layanan  | 1 Layanan                                                | 99,61 |
| Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perencanaan                       | Jumlah Layanan Perencanaan                    | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan Raker                                         | 99,98 |
| Terlaksananya Pembinaan Administrasi Umum                              | 1. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Unit     | 1 Unit                                                   | 99,99 |
|                                                                        | 2. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan           | 1 Unit     | 1 Unit                                                   | 99,85 |
|                                                                        | 3. Jumlah Layanan Perkantoran                 | 12 Bulan   | 12 Bulan                                                 | 98,79 |
| Terlaksananya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | Jumlah Layanan Data dan Informasi             | 1 Layanan  | Layanan Data dan Informasi berupa peralatan jaringan LAN | 99,96 |
| <b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>                                 |                                               |            |                                                          |       |



| Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                              | Target     | Realisasi  | %   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| Meningkatnya Kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama | Jumlah Lokasi Operasional SEKBER FKUB Kab/Kota | 1 Lokasi   | 1 Lokasi   | 100 |
|                                                     | Jumlah Dialog Lintas Agama Di Kecamatan        | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 |

#### 5. Bimbingan Masyarakat Kristen

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasi pada Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

| Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                    | Target   | Realisasi | %     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 12 Bulan | 12        | 71,53 |

#### 6. Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya pada Bimbingan



Masyarakat Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Program Bimbingan Masyarakat Katolik**

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                       | Target   | Realisasi | %     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Bimas Katolik | Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100   |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik                       | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi Guru PNS   | 12 Bulan | 12 Bulan  | 99,47 |





---

#### **D. Analisis Capaian Kinerja**

Pelaporan hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh seorang pimpinan unit kerja Instansi Pemerintah adalah bentuk transparansi dari suatu organisasi tersebut. Untuk dapat bermanfaat sebagai input bagi perubahan dan perbaikan laporan sebaiknya disampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Selain sebagai instrument akuntabilitas, data dan informasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh pimpinan organisasi yang lebih tinggi dan lembaga legislative sebagai input dalam pengambilan keputusan publik.

Pada lingkup manajemen pemerintahan, sedikitnya terdapat 5 macam penggunaan data dan informasi sebagai hasil kajian atau evaluasi program yaitu:

1. Instrumen transparansi dan akuntabilitas, sebagai bahan alat komunikasi yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
2. Perbaikan efisiensi alokasi anggaran, sebagai input bagi penganggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi pendanaan berdasarkan pada fakta kinerja pencapaian program yang fokus. Dengan demikian diharapkan proses penganggaran menjadi lebih efisien;
3. Input perbaikan dalam system manajemen organisasi;
4. Inovasi untuk reformasi/perbaikan pelayanan publik;
5. Input pengambilan keputusan publik.

Untuk melihat keberhasilan organisasi maka dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi dan analisis dilakukan pada capaian indikator kinerja program dan efisiensi serta efektifitas kegiatan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *Input*, *Output*, dan



*Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outputnya* untuk triwulan IV ini diatas 80 % dan sebaliknya kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian rata-rata indikator *outputnya* dibawah 80 %. Berikut analisis capaian tabel diatas :

Tabel 3.2 di atas menggambarkan bahwa capaian dari *outcomes* sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan ada yang melebihi dari target dan ada yang belum teralisasi, karena ada beberapa indikator yang memang tidak bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Anggaran pada Bimas Islam telah terjadi beberapa kali revisi anggaran, hal ini terlihat pada sasaran strategis pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, sehingga anggaran pada seksi Bimas Islam ini mendapat tambahan dana dari anggaran triwulan III sebesar Rp. 87.300.000,-, jadi realisasi yang dicapai pada seksi Bimas Islam pada Triwulan IV ini sebesar **94,75 %**.

Volume dari Indikator kinerja pada seksi Bimas Islam ini tidak tepat sasaran, ini terlihat dari Pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah bagi penilaian angka kredit penghulu yang dicairkan selama 12 bulan bukan untuk penghulu yang terbina sebanyak 11 orang.



Begitu juga dengan KUA yang memenuhi standar Pelayanan Minimal untuk 10 lokasi, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memiliki 3 KUA dari masing-masing kecamatan yang ada, sehingga KUA yang menerima PNPB di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berjumlah 3 Lokasi.

Ada beberapa indikator kegiatan yang ada pada DIPA volume kegiatan melebihi dari target yang seharusnya, hal ini terlihat dari Indikator Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah volume yang ada diperuntukkan bagi pasangan pra nikah sebanyak 300 orang tetapi di realisasikan sebanyak 500 orang dalam V angkatan. Begitu juga halnya dengan pengelolaan Hisab Rukyat, biaya perjalanan dinas yang ada melebihi dari target yaitu sebanyak 25 kali dengan dana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Bimbingan Masyarakat Islam Triwulan IV ini telah sepenuhnya terlaksana dengan baik dan efektif.

Tabel 3.3 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan pada Triwulan IV ini telah melebihi 90 %, sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Pendidikan Islam pada seksi pendidikan agama Islam ini telah terlaksana dengan baik.

Hal ini dapat terlihat dari tunjangan profesi bagi Guru PAI PNS dan Non PNS yang telah dicairkan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Anggaran pada seksi PENDIS telah terjadi beberapa kali revisi anggaran, hal ini terlihat dengan adanya penambahan pemberian tunjangan fungsional / insentif bagi guru Non-PNS yang dahulunya bernama subsidi tunjangan fungsional guru bukan PNS yang sekarang diganti dengan insentif tunjangan guru fungsional Non-PNS.

Hadirnya tunjangan insentif bagi guru Non-PNS ini sebagai solusi atas dihapusnya subsidi tunjangan fungsional guru sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 74 tahun 2008



tentang Guru. Dalam PP tersebut terdapat ketentuan yang menghapus pemberian tunjangan fungsional guru.

Ketentuan ini dimunculkan kembali karena terbitnya KMA No.1 tahun 2018 tentang Insentif Guru Bukan PNS Kementerian Agama tertanggal 03 Januari 2018 sehingga anggarannya muncul kembali. Indikator ini baru dianggarkan pada pelaksanaan perubahan anggaran APBN di bulan Oktober sehingga tunjangan fungsional/insentif guru Non-PNS ini baru di triwulan IV terealisasi.

Selain itu ada indikator lain yang baru terealisasi dan dianggarkan pada triwulan IV ini, terlihat pada penambahan akun pembayaran tunjangan kinerja guru MIN sebanyak 19 orang yang dibayarkan selama 2 tahun dari bulan maret tahun 2016 hingga november 2018 yang diambil dari kelebihan dana Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Madrasah. Untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi guru MIN bulan desember tahun 2018 dibayarkan dengan menggunakan akun tunjangan kinerja pegawai.

Dalam hal dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan dengan pemberian dana BOS bagi Madrasah baik negeri maupun swasta mendapat penambahan anggaran dikarenakan jumlah siswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih banyak dari sebelumnya sehingga terjadi revisi anggaran pada triwulan IV ini.

Selain itu ada beberapa indikator yang tetap melaksanakan kegiatan walaupun tidak memiliki dana bahkan ada juga kegiatan yang tetap dilakukan dengan dana yang kurang memadai, hal ini dapat di lihat dari kegiatan pada Pondok Pesantren.

Kemudian indikator kegiatan berupa Bantuan Operasional Pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an dan Pendidikan Pondok Pesantren sudah terealisasi, walaupun dalam triwulan IV ini anggaran pada seksi



PENDIS terjadi pengurangan dana sebesar Rp. 5.184.000,- dari triwulan sebelumnya tapi semua indikator yang ada telah terlaksana secara efektif, sehingga Layanan Administrasi Perencanaan dan Sistem pada seksi Pendidikan Agama Islam secara menyeluruh telah terealisasi sebesar **97,96 %**.

Tabel 3.4 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan melebihi dari target yang dicapai yaitu 100 %, hal ini di dukung dengan sudah terlaksananya semua kegiatan yang di tergetkan dalam tahun anggaran 2018, akan tetapi pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mengenai pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN mengalami pagu minus, karena anggaran semula mengalami kekurangan dari realisasi yang ada. sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk Triwulan IV ini sudah terlaksana dengan baik dan efektif dengan pencapaian sebesar **109,89 %**

Tabel 3.5 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan melebihi dari target yang diinginkan yaitu 90%, terlihat dengan telah terlaksananya semua indikator yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2018. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Sub Bagian Tata Usaha telah terealisasi sebesar **96,63 %**.

Table 3.6 di atas menggambarkan bahwa capaian outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan belum mencapai 90%, hal ini disebabkan karena dana anggaran untuk bimas kristen melebihi dari target yang ada, akan tetapi semua indikator yang ada pada bimas kristen telah terealisasi secara sempurna, sehingga dapat dikatakan sasaran pada program pembinaan



Bimas Kristen sudah terlaksana dengan baik dan efektif, dengan pencapaian sebesar **71,53%**.

Table 3.7 di atas menggambarkan bahwa capaian outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan melebihi pencapaian 90%, pada Bimas Katolik ini terjadi revisi anggaran dari triwulan III yang lalu, hal ini menyebabkan pembayaran gaji dan tunjangan guru mengalami penambahan sehingga, dapat dilihat secara keseluruhan program Bimbingan Masyarakat Katolik triwulan IV terealisasi sebesar **99,48%**.

#### **E. Akuntabilitas Keuangan**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-



lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dana publik;
2. Penyajian tepat waktu ;
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Dalam Tahun Anggaran 2018 berdasarkan DIPA, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **23.592.767.000,-** sedangkan realisasi hingga triwulan IV ini sebanyak Rp. **22.821.345.246,-**. Dengan jumlah persentase sebesar **97%**.

Jika dilihat Secara rinci alokasi anggaran menurut program dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran menurut program dan realisasi triwulan IV tahun anggaran 2018

| No | Program                                                                           | Pagu<br>(Rp000) | Realisasi      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|    |                                                                                   |                 | (Rp000)        | %     |
| 1  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama | 2.471.387.000   | 2.388.059.846  | 96,63 |
| 2  | Bimbingan Masyarakat Islam                                                        | 7.756.281.000   | 7.340.582.190  | 94,75 |
| 3  | Pendidikan Islam                                                                  | 12.471.392.000  | 12.217.452.316 | 97,96 |



| No            | Program                        | Pagu<br>(Rp000)       | Realisasi             |           |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|               |                                |                       | (Rp000)               | %         |
| 4             | Bimbingan Masyarakat Kristen   | 248.676.000           | 177.885.868           | 71,53     |
| 5             | Bimbingan Masyarakat Katolik   | 110.261.000           | 109.691.081           | 99,48     |
| 6             | Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 534.770.000           | 587.674.008           | 109,89    |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>23.592.767.000</b> | <b>22.821.345.246</b> | <b>97</b> |

Berdasarkan program, anggaran Kementerian Agama tahun 2018 dialokasikan untuk 6 (Enam) Program. Anggaran terbesar Kementerian Agama dialokasikan pada Program Pendidikan Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Anggaran terbesar kedua dialokasikan pada Program Bimbingan Masyarakat Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan pada seksi Bimas Islam dan operasional 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penyuluhan agama, dan pembinaan keagamaan lainnya.

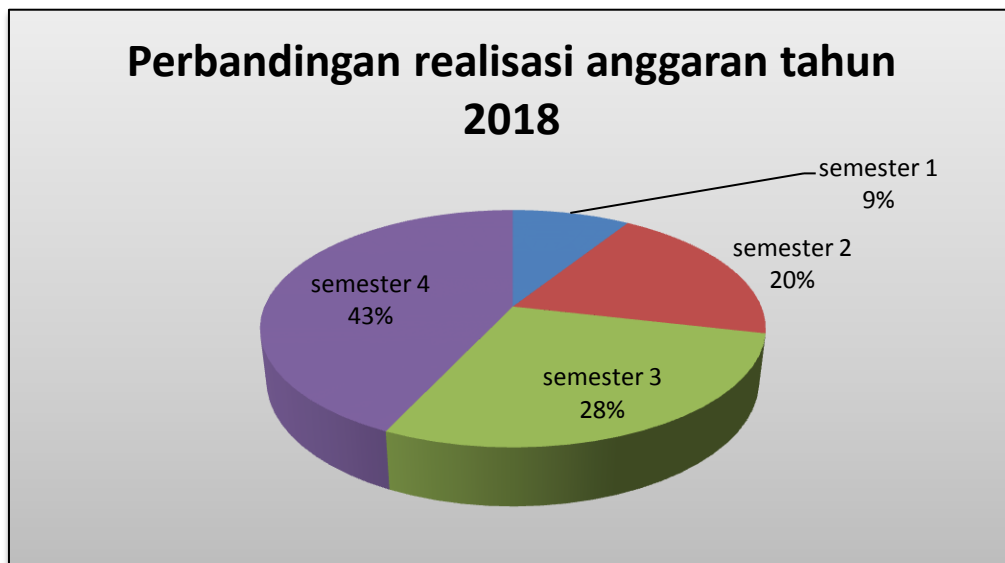
Perbandingan realisasi anggaran dari triwulan I,II, III dan triwulan IV dapat dilihat dari tabel 3.9 dan gambar 3.1 di bawah ini :





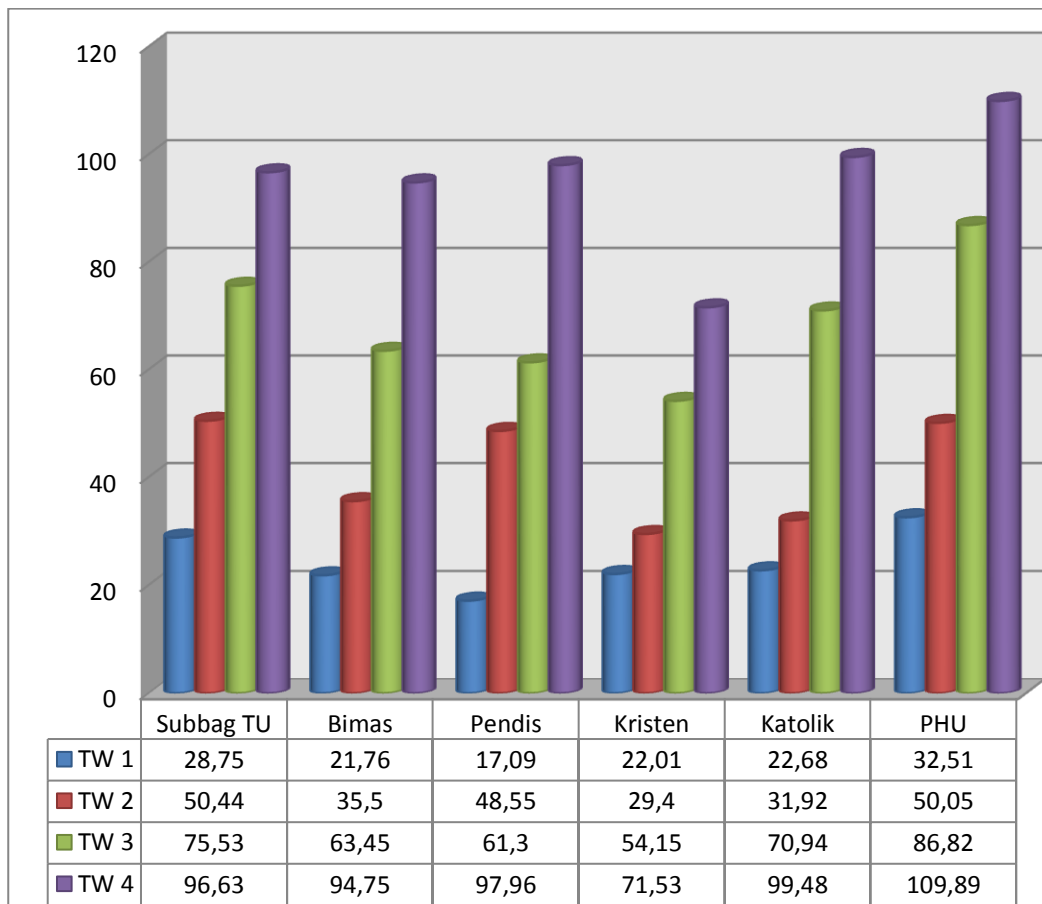
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi anggaran triwulan 1, II, III dan triwulan IV tahun 2018

| No            | Program                                                                           | Pagu (Rp000)          | Realisasi Triwulan I |              | Realisasi Triwulan II |              | Realisasi Triwulan III |              | Realisasi Triwulan IV |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|               |                                                                                   |                       | (Rp000)              | %            | (Rp000)               | %            | (Rp000)                | %            | (Rp000)               | %         |
| 1             | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama | 2.471.387.000         | 710.550.045          | 28,75        | 1.246.497.346         | 50,44        | 1.866.648.680          | 75,53        | 2.388.059.846         | 96,63     |
| 2             | Bimbingan Masyarakat Islam                                                        | 7.756.281.000         | 1.668.700.285        | 21,76        | 2.722.543.155         | 35,50        | 4.865.808.947          | 63,45        | 7.340.582.190         | 94,75     |
| 3             | Pendidikan Islam                                                                  | 12.471.392.000        | 2.132.530.395        | 17,09        | 6.057.693.441         | 48,55        | 7.647.556.746          | 61,30        | 12.217.452.316        | 97,96     |
| 4             | Bimbingan Masyarakat Kristen                                                      | 248.676.000           | 54.735.144           | 22,01        | 73.112.476            | 29,40        | 134.668.204            | 54,15        | 177.885.868           | 71,53     |
| 5             | Bimbingan Masyarakat Katolik                                                      | 110.261.000           | 24.915.378           | 22,68        | 35.067.098            | 31,92        | 77.941.978             | 70,94        | 109.691.018           | 99,48     |
| 6             | Penyelenggaraan Haji dan Umrah                                                    | 534.770.000           | 173.814.793          | 32,51        | 267.642.103           | 50,05        | 464.274.481            | 86,82        | 587.674.008           | 109,89    |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                   | <b>23.592.767.000</b> | <b>4.765.246.040</b> | <b>20,27</b> | <b>10.402.555.619</b> | <b>44,25</b> | <b>15.056.899.036</b>  | <b>64,04</b> | <b>22.821.345.246</b> | <b>97</b> |



Gambar 3.1 persentase perbandingan realisasi anggaran Kemenag triwulan I, II, III dan triwulan IV tahun 2018

jika dilihat persentase realisasi serapan anggaran per-satker dari triwulan I, II, III dan triwulan IV tahun 2018 dapat dilihat dari gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2 persentase realisasi anggaran per-satker dari triwulan I,II, III dan IV tahun 2018



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama Triwulan IV tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut dari KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan esensi dari tujuan akuntabilitas, insentif dalam pengakuan kredibilitas dan peningkatan kepercayaan (*trust*) dari para *stakeholder* merupakan hal yang terpenting. Pelaporan kinerja merupakan alat sosialisasi terhadap kinerja positif yang telah dicapai untuk mendapatkan apresiasi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan IV tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2018 untuk Triwulan IV ini sepenuhnya telah mencapai 97%.

Secara ringkas seluruh pencapaian kinerja yang terdiri dari program, kegiatan dan sasaran hampir mencapai 100 %, dan telah terlaksana dengan baik dan efektif. Namun demikian, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.



Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2018, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, diantaranya:

1. Memberikan dorongan yang lebih pada pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan suatu kegiatan;
2. Penyusunan perencanaan kegiatan khususnya dalam pemberian bantuan beasiswa miskin agar diperhitungkan biaya pengiriman kepada siswa penerima bantuan pada tahun berikutnya;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan seakurat dan secermat mungkin, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
4. Untuk lebih besarnya serapan anggaran, masing-masing seksi agar mempercepat pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan laporan pertanggung jawabannya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 merupakan media dan bahan akuntabilitas tahun pertama untuk pelaksanaan Renstra 2015-2019. Namun demikian, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan



pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sehingga implementasi dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan akan lebih baik di masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.